

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gudang ternak, dengan mengembangkan program diklat berkeahlian dan berwawasan agribisnis dalam rangka mendukung target utama pembangunan kementerian pertanian. Melalui peranannya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang handal di bidang peternakan baik aparatur maupun non aparatur.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yaitu:

"Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Memujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat diartikan bahwa Pembangunan sektor pertanian haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaat diberikan dengan penyelenggaraan pertanian secara berkelanjutan. Visi Kementerian Pertanian memiliki 4 (empat) kunci yang meliputi : pertanian, pertanian maju, pertanian berkelanjutan dan pertanian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan visi Kementerian Pertanian maka dirumuskan misi Kementerian Pertanian 2025-2029 yang meliputi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan petani
- 2) Mendorong kemandirian pangan asal pertanian
- 3) Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia
- 4) Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan dan manusia
- 5) Meningkatkan penajaman reformasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi besar tersebut maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Visi 2025-2029 yang selaras dengan Kementerian Pertanian. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan pertanian Nasional melalui

penguatan kapasitas, sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDM 2025-2029 yaitu :

"Sumber daya manusia pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045."

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan. Misi BPPSDMP terdiri atas :

- 1) Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang
- 2) Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian
- 3) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan SDM Pertanian serta memperhatikan dinamika kondisi lingkungan strategis, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT mengacuh pada visi dan misi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan sebagai eselon I.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga menetapkan Motto Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah:

"P R I S M A"

Profesional, Ramah, Inovatif, Santun, Mutu, dan Akuntabel.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian menuju Indonesia emas 2045. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

- 1) Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan).
- 2) Meningkatkan kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang.
- 4) Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap layanan public BBPP Kupang.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur berbasis web terintegrasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari 9 Modul pengguna sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Modul-modul tersebut terdiri dari; modul Admin, modul Penganggaran, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Pembayaran, modul Persediaan, modul Piutang, modul General Ledger & Pelaporan (GLP), serta modul Aset Tetap.

Laporan Keuangan ini disusun menggunakan data yang diperoleh dari SAKTI menggunakan modul GLP. Data yang terhimpun di dalam modul GLP dan digunakan untuk proses penyusunan Laporan Keuangan merupakan integrasi dari modul penganggaran, bendahara, pembayaran, persediaan dan aset tetap.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap
 - Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap
 - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - d) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja T.A 2026

Uraian	Anggaran Semula 2026	Anggaran Setelah Revisi 2026	Realisasi 2026	%
Pendapatan				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	350.000.000	350.000.000	520.773.000	148.79
Jumlah Pendapatan	350.000.000	350.000.000		
Belanja				
Belanja Pegawai	6.876.778.000	6.876.778.000	3.422.388.829	49.76
Belanja Barang	6.512.216.000	3.199.293.000	1.992.864.512	62.29
Belanja Modal	566.600.000	266.600.000	0	0.00
Jumlah Belanja	13.955.594.000	10.342.671.000	5.415.273.341	52.36

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Semester I per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 520.773.227,00 atau mencapai 148,79% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I T.A 2026

Kode Akun	Uraian	2026		
	Akun Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Pendapatan
4521	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha			
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	120.000.000	103.822.500	86.52

Kode Akun	Uraian	2026		
	Akun Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Pendapatan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	19.982.000	0.00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	40.000.000	0	0.00
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	26.337.374	0.00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	130.000.000	212.223.450	163.25
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi			
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau pelatihan	60.000.000	5.850.000	9.75
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	756.000	0.00
4258	Pendapatan Denda			
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian dan Pekerjaan Pemerinfah	0	73.800.240	0.00
4259	Pendapatan Lain-Lain			
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78.001.663	0.00
	Jumlah	350.000.000	520.773.227	148.79

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp5.415.273.341,00 atau 52.36% dari anggaran belanja sebesar Rp10.342.671.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 30 Juni 2026

Uraian	2026		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.876.776.000	3.422.388.829	49.77

Uralan	2026		
Akun Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	3.199.293.000	1.992.884.512	62.29
Belanja Modal	266.600.000	0	0.00
Jumlah Belanja	10.342.671.000	5.415.273.341	52.36

Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uralan	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaiikan/ Penurunan	%
Belanja Pegawai	3.422.388.829	2.244.130.337	1.178.258.492	52.50
Belanja Barang	1.992.884.512	2.201.136.700	-208.252.188	-9.46
Belanja Modal	0	916.396.260	-916.396.260	-100.00
Total Belanja	5.415.273.341	5.361.663.297	53.610.044	1.00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3.422.388.829,00 dan Rp 2.244.130.337,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Peningkatan jumlah belanja pegawai pada tahun anggaran 2026 dikarenakan mulai bulan April 2025, BBPP Kupang mendapat tambahan PPPK Tahap I sebanyak 20 Orang, kemudian pada bulan Juni 2025, BBPP Kupang mendapat tambahan CPNS sebanyak 11 Orang, pada bulan September 2025 BBPP kembali mendapat tambahan 1 orang PNS dan pada bulan November 2025, BBPP Kupang mendapat tambahan PPPK Tahap II sebanyak 13 orang. Hal tersebut juga berdampak pada realisasi penyerapan Gaji ke 13 dan Gaji ke 14 yang telah terlaksana pada Semester I TA 2026.

**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.276.992.354	2.085.329.641	191.662.713	9.19
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.088.041.475	137.951.696	950.089.779	688.71
Belanja Lembur PNS	28.746.000	20.692.000	8.054.000	29.26
Belanja Lembur PPPK	30.609.000	157.000	30.452.000	19.396.18
Jumlah Belanja	3.426.644.433	2.244.130.337	1.182.534.096	52.69

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1.992.884.514,00 dan Rp 2.201.136.700,00. Nilai realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar sebesar -9.46% atau sejumlah Rp – 208.252.186,00 dari Tahun Anggaran 2025.

**Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Barang Operasional	327.602.052	519.996.686	-192.394.634	-37.00
Belanja Barang Non Operasional	132.105.400	363.696.622	-231.591.222	-63.68
Belanja Barang Persediaan	179.985.925	102.181.484	77.784.441	76.12
Belanja Jasa	150.326.831	210.197.928	-59.871.297	-28.48
Belanja Pemeliharaan	999.958.807	588.239.101	411.719.706	69.99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	188.925.697	416.824.879	-227.899.182	-54.67
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.000.000	0	14.000.000	100.00
Jumlah	1.992.884.512	2.201.136.700	-208.252.188	-9.46

B.5. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026 adalah sejumlah Rp 0,00 sedangkan pada 30 Juni 2025 sebesar Rp 916.396.260,00. Penurunan belanja modal pada Semester I tahun anggaran 2026 dikarenakan belum ada penarikan dana atas setoran PNBPN yang dilakukan oleh Satker karena belanja modal T.A 2026 bersumber 100% dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaiikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	916.396.260	- 916.396.260	-100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	916.396.260	-916.396.260	-100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sejumlah Rp 75.000.000,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Sumber dana dari Kas di Bendahara Pengeluaran ini berasal dari uang muka kerja yang diberikan oleh negara melalui KPPN untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja (Satker). Pada Tahun 2026 jumlah permintaan dan pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah sejumlah Rp 75.000.000,00.

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sejumlah Rp 3.558.320,00 dan Rp 0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dalam hal ini berupa rumah dinas yang disewakan kepada para pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang terdiri atas 21 unit rumah dinas yang dikuasi penggunaannya oleh 19 PNS sejumlah Rp 3.235.745,00 dan 2 unit rumah dinas yang dikuasi penggunaan oleh PPPK sejumlah Rp 238.425,00 melalui mekanisme pemotongan Pembayaran Langsung (LS) atas Gaji pegawai PNS dan PPPK per 1 Juli 2026.

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 58.025.000,00 dan Rp 57.007.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Barang Konsumsi	57.413.500	31.007.500	26.406.000	85,16
Bahan untuk Pemeliharaan	611.500	1.650.000	- 1.038.500	-62,94
Persediaan Lainnya	0	24.350.000	- 24.350.000	-100,00
Jumlah	58.025.000	57.007.500	1.017.500	1,78

Detail barang persediaan dijelaskan lebih rinci pada CaLBMN.

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah

masing-masing sebesar Rp 37.098.259.000,00 dan Rp 37.098.259.000,00 atau selama Semester I tahun anggaran 2026 tidak ada perubahan (mutasi tambah-keluar) pada akun aset tetap tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan Rp 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 14.001.660.444,00 dan Rp 14.005.710.444,00. Selama Semester I tahun anggaran 2026 terdapat penurunan nilai aset peralatan dan mesin senilai Rp – 4.050.000,00. Penurunan ini dikarenakan adanya penghentian aset dari penggunaannya berupa 2 unit *Ground Water Analogous* senilai masing-masing Rp 2.025.000,00. Penghentian penggunaan aset ini menyebabkan adanya reklasifikasi aset tetap dari Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lain-Lain sejumlah Rp 4.050.000,00 dengan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sejumlah Rp - 4.050.000,00.

Nilai Buku dari akun Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	14.005.710.444
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap	4.050.000
Saldo Per 30 Juni 2026	14.001.660.444
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-11.656.464.414
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	2.345.196.030

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 30.862.496.445,00 dan Rp 30.862.496.445,00 atau selama 6 (enam) bulan terakhir tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Adapun rinciannya mutasi tambah dan keluar serta Nilai Buku dari akun Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	30.862.496.445
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap	0
Saldo Per 30 Juni 2026	30.862.496.445
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-7.208.430.756
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	23.654.065.689

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sejumlah Rp 6.774.313.363,00 dan Rp 6.774.313.363,00 atau selama 6 (enam) bulan tidak mengalami peningkatan/penurunan.

Adapun rinciannya mutasi tambah dari akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	6.774.313.363
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap	0
Saldo Per 30 Juni 2026	6.774.313.363
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-2.184.230.303
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	4.590.083.060

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00 dan Rp 25.000.000,00 yang artinya tidak ada perubahan pada Saldo akun tersebut. Aset tetap lainnya ini berupa buku-buku untuk koleksi perpustakaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 21.049.125.473,00 dan Rp 20.048.047.557,00, atau mengalami perubahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar 4,99% atau sejumlah Rp 1.001.077.916,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Akumulasi Aset Tetap
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Des' 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.656.464.414	11.248.415.832	-408.048.582	-3,63
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.208.430.756	6.753.645.949	-454.784.807	-6,73
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.656.464.414	2.045.985.776	-9.610.478.638	-469,72
Jumlah	21.049.125.473	20.048.047.557	-1.001.077.916	-4,99

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00 dan Rp 25.000.000,00 yang menggambarkan tidak ada perubahan pada saldo Aset Tak Berwujud (0,00%). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Dimana aset

tersebut berupa software komputer berupa website Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang <https://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id/> dan akan dilakukan penghapusan, karena aset tersebut berasal dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal dan tidak dimanfaatkan.

Perbandingan Saldo Aset Tak Berwujud
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Des' 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Website	25.000.000	25.000.000	0	0,00
Jumlah	25.000.000	25.000.000	0	0,00

C.3.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.188.232.500,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan aset lainnya yang dapat diidentifikasi dan dipergunakan untuk tujuan khusus atau tertentu. Di Tahun Anggaran 2025 terdapat Pekerjaan Konstruksi yang sampai akhir periode ada potensi pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% namun sudah mencapai progress pekerjaan lebih dari 75% sehingga menggunakan skema/sistem pembayaran menggunakan RPATA, Dimana pada sistem ini anggaran pada tahun berjalan yang dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga akan disimpan pada rekening khusus atau tertentu dan akan dilakukan pencairan dana jika pekerjaan sudah 100% dilakukukan sesuai dengan BAST yang terbit. Sedangkan pada Triwulan I tahun anggaran 2026 sudah tidak terdapat Saldo yang dibatasi penggunaannya dikarenakan saldo pada tahun 2025 sudah dilakukan pencairan atau proses pembayaran atas pekerjaan kontrak yang dilakukan/selesai dilakukan pada awal 2026.

Perbandingan Dana yang dibatasi Penggunaannya
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Des' 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana yang dibatasi Penggunaannya	0	1.188.232.500	-1.188.232.500	-100,00
Jumlah	0	1.188.232.500	-1.188.232.500	-100,00

Dana yang dibatasi penggunaannya terdiri dari :

1. Dana yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan konstruksi SinggaKo mart sejumlah Rp 1.188.025.000,00 yang merupakan Termin IV (Pelunasan) kepada CV. ORLAND yang secara kontrak harusnya selesai pada tanggal 14 Desember 2025 sesuai dengan kontrak nomor 544/PL/020/I.19/7/2025 tanggal 18 Juli 2025 sedangkan pembayaran langsung (SP2D) per tanggal 02 Januari 2026.
2. Dana yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pengawasan pembangunan konstruksi SinggaKo sejumlah Rp 70.207.500,00 yang merupakan Termin IV (Pelunasan) kepada CV. SABA CONSULTT yang secara kontrak harusnya selesai pada tanggal 22 Desember 2025. Namun, terdapat ketentuan bahwa pencairan pembayaran pekerjaan pengawasan konstruksi mengikuti penyelesaian pekerjaan Pembangunan fisik konstruksi SinggaKo sesuai dengan Kontrak nomor 542/PL.020/I.19/7/2025 tanggal 18 Juli 2025 sedangkan pembayaran langsung (SP2D) per tanggal 06 Januari 2026.

C.3.3. Aset Lain-lain

Nilai Aset lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 4.050.000,00 dan Rp 830.904.166,00 atau selama 6 (tiga) bulan terakhir mengalami perubahan yakni penurunan sebesar -99,51% atau sejumlah Rp -826.856.166,00. Dan untuk nilai buku atau neto dari Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sejumlah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset lain-lain yang masih tercantum dalam Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pada semester I per 30 Juni 2026 ini merupakan Aset Tetap yang tidak dapat digunakan dalam operasi pemerintahan dikarenakan Aset Tetap ini dalam keadaan rusak berat dan atau tidak dapat ditemukan fisiknya namun masih perlu mendapat review serta persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI untuk dilakukan proses penghapusan nilai Aset Tetap melalui surat No 403/PL.320/I.19/04/2026 per tanggal 21 April 2026 berupa 2 unit *Ground Water Analogous* senilai masing-masing Rp 2.025.000,00. Aset Lain-lain ini sebelumnya berasal dari reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain sejumlah Rp 4.050.000,00 dikarenakan proses penghapusan Aset Tetap yang masih berjalan seperti dipenjelasan diatas.

Adapun rinciannya mutasi keluar dari akun Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Nilai Buku Aset Lain-lain per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026	830.904.166
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	4.050.000
Mutasi Kurang	
Mutasi Keluar Aset Lain-lain	-830.904.166
Saldo Per 30 Juni 2026	4.050.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-830.904.166
Tambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Reklasifikasi)	-4.050.000
Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	830.904.166
Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Maret 2026	-4.050.000
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	0

Detail Aset Lainnya dan penghapusan Aset Lainnya dijelaskan lebih rinci pada CaLBMN.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 399.561.552,00 dan Rp 1.214.056.268,00 atau mengalami penurunan sejumlah Rp 814.494.716,00 atau sebesar 67,09%. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Des' 2026 (Rp)	Kenaiikan/ Penurunan	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	391.164.552	0	391.164.552	0,00

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Des' 2026 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8.397.000	25.823.768	-17.426.768	-67.48
Utang Kepada Pihak Lainnya	0	1.188.232.500	-1.188.232.500	-100.00
Jumlah	399.561.552	1.214.056.268	-814.494.716	-67.09

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 terdiri dari :

1. Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS Bulan Juli 2026 untuk 54 Pegawai/134 Jiwa yang terbit SP2D nomor 260390000030163 per tanggal 1 Juli 2026 sejumlah Rp 262.190.251,00.
2. Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji PPPK Induk Bulan Juli 2026 untuk 37 Pegawai/89 Jiwa yang terbit SP2D Nomor 260390000030162 per tanggal 1 Juli 2026 sejumlah Rp 128.974.301,00.

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 terdiri dari :

- 1) Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPPK Paruh Waktu Induk Bulan Juni Tahun 2026 untuk 2 Pegawai. Sesuai SK No.19601/KPTS/KP.110/A2/09/2025 dan No.19603/KPTS/KP.110/A2/09/2025 tertanggal 30 September 2025 dan untuk tanggal SP2D per 1 Juli 2026 sejumlah Rp 7.500.000,00.
- 2) Pembayaran Belanja Barang Berupa Lembur dan Uang Makan Lembur PPPK Paruh Waktu Bulan Mei 2026 untuk 2 Pegawai Sesuai SPT No.468a/TU.040/I.19/04/2025 tertanggal 30 April 2026 dan untuk tanggal SP2D per 1 Juli 2026 sejumlah Rp 897.000,00

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 970.000,00 dan Rp 0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan tagihan atas pengeluaran-pengeluaran operasional Satuan Kerja yang telah dilakukan dan telah dibukukan tetapi belum dilakukan penggantian uang atau penagihan ke Negara melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP)-KKP oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 terdiri atas:

Kode Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	970.000
Total		970.000

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 75.000.000,00 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang diwakili oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Pada tahun anggaran 2026 Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menerima Uang Muka dari KPPN sejumlah Rp 75.000.000,00.

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 68.403.783.463,00 dan Rp 68.773.915.427,00 atau mengalami penurunan sejumlah Rp -370.131.964,00 atau sebesar - 0.54%. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam penjelasan pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 426.347.884,00 dan Rp 127.011.985,00 dengan jumlah kenaikan yang signifikan sejumlah Rp 299.335.899,00 (235.68%) hal ini disebabkan karena adanya sumbangan terbesar dari pendapatan denda (425811) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintahan sejumlah Rp 73.800.240,00 yang dibukukan di T.A 2026 atas pekerjaan yang dilakukan atas kontrak 2025 namun terjadi keterlambatan penyelesaian sehingga serah terima pekerjaan dan pembayaran penyelesaian atas pekerjaan dilakukan pada T.A 2026 serta adanya peningkatan pada Jenis PNBPN lainnya seperti pada perbandingan di bawah ini :

**Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Juni 2026 (Rp)	Kenaiikan/ Penurunan	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	103.822.500	81.256.250	22.566.250	27.77
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.337.374	5.598.780	20.738.594	370.41
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	215.781.770	35.131.890	180.649.880	514.20
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.850.000	2.700.000	3.150.000	116.67
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	756.000	0	756.000	100.00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	73.800.240	2.325.065	71.475.175	3.074.11
Jumlah	426.347.884	127.011.985	299.335.899	235.67

Jumlah Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional ini berbeda dengan Laporan Neraca Percoba (Berkas Akual) dengan nilai masing-masing sejumlah Rp 426.347.884,00 dan Rp 524.331.547,00 atau terdapat selisih sejumlah Rp 97.983.663,00 dikarenakan adanya :

- 1) Pendapatan dari Penjualan Aset berupa Peralatan dan Mesin yaitu 1 (satu) paket inventaris kantor dalam kondisi rusak berat melalui mekanisme Lelang BMN yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sejumlah Rp 19.982.000,00.
- 2) Pendapatan Lain-lain berupa penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu karena adanya TGR (tuntutan gaji rugi) kepada pihak ketiga selaku kontraktor dalam pekerjaan konstruksi Gedung/Bangunan SinggaKo dan Pekerjaan Konstruksi Irigasi-Embung pada Tahun Anggaran 2025 dengan nilai total TGR sejumlah Rp 78.001.663,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3.813.553.381,00 dan Rp 2.518.002.206,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian Kerjasama (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.628.701.920	1.673.952.140	154.749.780	9,24
Pengembalian Pembulatan Gaji PNS	23.904	20.380	3.524	17,29
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114.446.654	110.841.118	3.605.536	3,25
Beban Tunj. Anak PNS	34.284.635	33.496.708	787.927	2,35
Beban Tunj. Struktural PNS	25.020.000	14.895.000	10.125.000	67,98
Beban Tunj. Fungsional PNS	206.834.000	222.692.000	-15.858.000	-7,12
Beban Tunj. PPh PNS	29.702.912	28.834.968	867.944	3,01
Beban Tunj. Beras PNS	88.279.980	83.210.580	5.069.400	6,09
Beban Uang Makan PNS	166.469.000	135.885.000	30.584.000	22,51
Beban Tunj. Umum PNS	45.419.600	39.420.000	5.999.600	15,22
Beban Gaji Pokok PPPK	905.342.654	115.329.800	790.013.054	685,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	16.387	1.820	14.547	799,29
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	49.050.719	8.649.720	40.400.999	467,08
Beban Tunj. Anak PPPK	15.037.832	2.306.592	12.731.240	551,95
Beban Tunj. Fungsional PPPK	42.659.992	10.125.000	32.734.992	323,31
Beban Tunj. Beras PPPK	54.121.880	7.169.580	46.952.300	654,88
Beban Uang Makan PPPK	118.593.000	10.323.000	108.270.000	1.048,82
Beban Tunjangan Umum PPPK	31.993.332	0	31.993.332	100,00
Beban Uang Lembur	26.746.000	20.692.000	6.054.000	29,26

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Uang Lembur PPPK	30.609.000	157.000	30.452.000	19.396,18
Jumlah	3.813.553.381	2.518.002.206	1.295.551.175	51,45

Beban Pegawai mengalami peningkatan signifikan karena ada penambahan PPPK Tahap I sebanyak 20 Orang dan Tahap II sebanyak 13 orang serta PNS tambahan sebanyak 14 orang yang terdiri 13 orang dari CPNS dan 1 orang PNS dari mutasi Pemerintah Daerah dibandingkan dengan beban pegawai pada semester I tahun anggaran 2025 di Balai besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 178.879.925,00 dan Rp 140.599.484,00. Saldo Beban Persediaan mengalami kenaikan sejumlah Rp 38.280.441,00 (27.23%). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Persediaan Konsumsi	154.529.925	111.799.484	42.730.441	38,22
Beban Persediaan Lainnya	24.350.000	28.800.000	- 4.450.000	-15,45
Jumlah	178.879.925	140.599.484	38.280.441	27,23

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 592.607.315,00 dan Rp 1.111.733.034,00. Saldo Belanja Barang dan Jasa mengalami

penurunan signifikan sejumlah Rp -519.125.719,00 atau sebesar (-46.70%). Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026	2025	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Keperluan Perkantoran	293.363.052	522.472.394	-229.109.342	-43.85
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	586.000	580.000	6.000	1.03
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42.050.000	34.720.000	7.330.000	21.11
Beban Bahan	121.305.400	341.157.722	-219.852.322	-64.44
Beban Honor Output Kegiatan	10.600.000	23.850.000	-13.050.000	-54.72
Beban Langganan Listrik	111.262.220	93.167.557	18.094.663	19.42
Beban Langganan Telepon	5.740.643	7.035.361	-1.294.718	-18.40
Beban Sewa	6.000.000	5.250.000	750.000	14.29
Beban Jasa Profesi	1.500.000	83.500.000	-82.000.000	-98.20
Jumlah	592.607.315	1.111.733.034	-519.125.719	-46.70

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1.000.997.307,00 dan Rp 615.455.101,00 atau mengalami kenaikan sejumlah Rp 385.542.206,00 atau (46.70%). Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	799.203.840	456.379.955	342.823.885	75.12
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.105.867	153.307.446	10.798.421	7.04
Beban Pemeliharaan Jaringan	18.900.000	0	18.900.000	100.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	18.787.600	5.767.700	13.019.900	225.74
Jumlah	1.000.997.307	615.455.101	385.542.206	62.64

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 188.925.687,00 dan Rp 421.269.379,00 atau mengalami penurunan signifikan sejumlah Rp 232.343.682,00 atau sebesar (-55,15%). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	188.925.697	349.028.029	-160.102.332	-45.87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	53.373.600	-53.373.600	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	18.867.750	-18.867.750	-100.00
Jumlah	188.925.697	349.028.029	-232.343.682	-55.15

Penurunan yang signifikan ini dikarenakan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang salah satu elemen belanja yang perlu dilakukan efisiensi adalah

Belanja Perjalanan Dinas di setiap Kementerian/Lembaga yang diterapkan juga untuk tahun anggaran 2026.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 14.000.000,00 dan Rp 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	14.000.000	0	14.000.000	100.00
Jumlah	14.000.000	0	14.000.000	100.00

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun Anggaran 2026 ini berupa 1 Unit Laptop P4S 1 (00370) senilai Rp 8.500.000,00 dan 1 Unit Projector P4S 1 (000371) senilai Rp 5.500.000,00 dengan nomor BAST Peralatan dan Mesin 707/PL.310/I.19/06/2026 tanggal 29 Juni 2026. Bantuan Kepada Masyarakat tersebut diserahkan kepada P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) Rumah Tani Sejahtera di Desa Oesusu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, Prov. NTT.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1.005.127.916,00 dan Rp 647.447.162,00 atau mengalami kenaikan yang signifikan sejumlah Rp 357.680.000,00 atau sebesar 55.24%. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026 (Rp)	2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412.088.582	192.833.663	219.264.919	53,21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	454.784.807	367.298.478	87.486.329	19,24
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.501.588	46.234.922	8.266.666	15,17
Beban Penyusutan Irigasi	81.752.170	39.750.097	42.002.073	51,38
Beban Penyusutan Jaringan	1.990.769	2	1.990.767	99,99
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Berwujud	0	1.330.000	-1.330.000	-100,00
Jumlah	1.005.127.916	647.447.162	357.680.754	-55,58

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 19.982.000,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Pelepasan Aset merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan lelang yang telah dilakukan pada tanggal 04 Februari 2026 dan HBL (hasil bersih lelang) BMN milik Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang disetorkan ke kas negara pada tanggal 13 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan kegiatan non operasional di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT sehingga Pendapat dari hasil lelang ini masuk dalam kategori pendapatan dari Kegiatan Non Operasional (Surplus Pelepasan Aset).

D.10. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 adalah masing-masing sebesar Rp 78.001.663,00 dan Rp 0,00. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan tidak rutin entitas diluar kegiatan pelepasan aset entitas atau satker. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya ini berasal dari penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu (2025) sejumlah Rp 78.001.663,00 karena hasil penilai kembali yang tidak sesuai

dengan kontrak pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yang menyimpulkan bahwa terjadi TGR (tuntutan ganti rugi) yang terdiri dari :

1. Penerimaan kembali dari CV ORLAND sejumlah Rp 66.610.097,00 atas pekerjaan Bangunan/Gedung SinggaKo (Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan).
2. Penerimaan kembali dari CV. FIKRI PRIMA KONSTRUKSI sejumlah Rp 11.391.566,00 atas pekerjaan Embung (Aset Tetap berupa Irigasi).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 68.773.915.427,00 dan Rp 55.421.554.860,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan 24.09% sejumlah Rp 13.352.360.567,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp -5.264.632.078,00 dan Rp -5.327.494.381,00. Saldo tersebut mengalami perubahan sebanyak 1.18% atau sejumlah Rp -62.862.303,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sejumlah dan Rp 0,00 dan Rp 0,00. Ini menggambarkan bahwa tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang.